

Laporan Penjajakan Cepat: Wacana Penutupan / Penertiban Lokasi Dadap Cengin Di Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang

Penulis:

Octavery Kamil

Plamularsih Swandari

Husein Basalamah

Jhon Gentar

Hady Irawan

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

KABUPATEN TANGERANG

2015



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan pada Yang Maha Kuasa atas selesainya penulisan Laporan Penjajakan Cepat: Wacana Penutupan/Penertiban lokasi Dadap Cengin, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anggota tim penjajakan cepat yang telah bekerja keras dalam proses pengumpulan, analisa data dan penyusunan laporan; mas Hady Irawan dari sekretariat KPA Kabupaten Tangerang yang telah memberikan penjelasan dan menjadi teman diskusi dalam persiapan dan penyusunan tujuan penjajakan cepat bersama, tim pendukung dari sekretariat KPA Kabupaten Tangerang yang memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mengatur agar proses penjajakan cepat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan; serta kerja sama narasumber dan informan yang memberikan dukungan dengan keterbukaan dan kerjasama melalui partisipasi dalam studi.

Studi ini dilaksanakan atas permintaan dari Sekretariat KPA Kabupaten Tangerang, terkait dengan wacana yang muncul terkait dengan penutupan/penertiban lokasi Dadap Cengin. Dengan waktu yang terbatas untuk proses pengumpulan data dan waktu penelitian dan terbatasnya data sekunder yang dapat dimanfaatkan, akhirnya disepakati bahwa metode penjajakan cepat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi awal untuk menjadi bahan pertimbangan yang akan digunakan oleh Sekretariat KPA Kabupaten Tangerang dan instansi terkait lainnya dalam menentukan kerja dan langkah-langkah ke depan.

Kritik dan saran atas laporan ini akan kami sambut dengan gembira dan tangan terbuka untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih tajam terkait dengan wacana penutupan/penertiban lokasi Dadap Cengin. Atas perhatian dan dukungan semua pihak atas pelaksanaan Penjajakan Cepat ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, April 2015

Octavery Kamil

Konsultan, mewakili tim Penjajakan Cepat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Studi.....	1
1.2 Rencana Pengembangan Ekonomi Pantai Utara.....	2
1.3 Situasi dan Upaya Penanggulangan HIV AIDS di Kab. Tangerang	3
1.4 Tujuan Studi	7
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	5
2.1 Waktu Penelitian.....	5
2.2 Pengumpulan Data.....	5
2.3 Analisa Data	6
2.4 Kegunaan dan Keterlibatan Penjajakan Cepat.....	7
BAB III. HASIL PENJAJAKAN CEPAT	8
3.1. Sejarah Berdirinya Dadap Cengin	8
3.2 Gambaran Lokasi Dadap.	9
3.3 Ketergantungan Masyarakat Secara Ekonomi dengan Keberadaan Lokasi Dadap	12
3.4 Program Kesehatan dan Sosial di Lokasi Dadap Cengin	14
3.5. Persepsi Terhadap Wacana Penertiban Lokasi Dadap Cengin	18
3.6 Rencana dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Wacana Penertiban Lokasi Dadap. .	22
3.7 Rekomendasi Praktis dari Narasumber Penelitian.....	24
BAB IV. DISKUSI DAN REKOMENDASI	25
4.1. Rencana dan Strategi Pemerintahan Kabupaten Tangerang.....	25
4.2 Perspektif Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Terhadap Wacana Penertiban	27
4.3 Potensi Pengaruh Penutupan Lokasi Dadap Cengin Terhadap Program HIV.....	28
4.4 Rekomendasi <i>Stakeholder</i> Terkait Rencana Penutupan	29
4.5 Contoh Tahapan Program/Rencana Penutupan Dadap Cengin.....	30
BAB V. Penutup	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

1.Peta Wilayah Kabupaten Tangerang.....	1
2. Data Kasus HIV dan AIDS Tahun 1999 s.d 2014.....	2
3.Peta Wilayah Kecamatan Kosambi.....	9
4. Gambar Lokasi Dadap Cengin	12
5. Gambar Keterkaitan Masyarakat dan Lokasi Dadap Cengin	14
6. 12 PKM Dengan Kasus IMS Terbanyak Tahun 2013 di Kab. Tangerang.....	16

DAFTAR TABEL

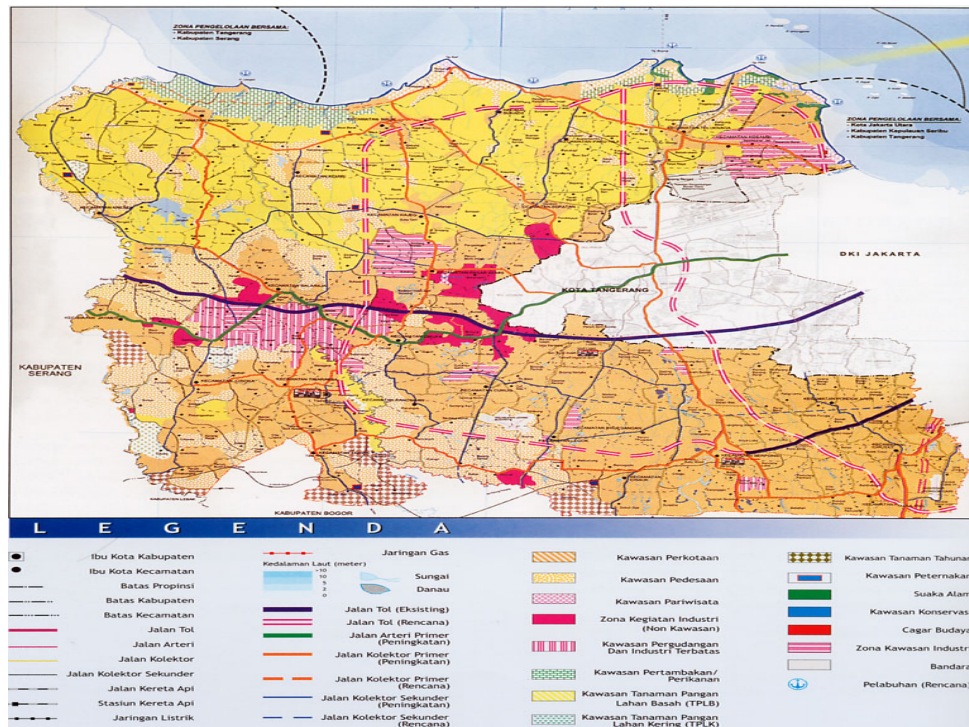
1. Perkiraan jumlah orang yang tergantung dari keberadaan lokasi Dadap Cengin	13
2. Perkiraan Perputaran Uang di lokasi Dadap Cengin	13
3. Peta Wilayah Kecamatan Kosambi	9
4. Gambar Lokasi Dadap Cengin	12
5. Gambar Keterkaitan Masyarakat dan Lokasi Dadap Cengin	14
6. Duabelas PKM Dengan Kasus IMS Terbanyak Tahun 2013 di Kab. Tangerang	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang studi

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah seluas 959,6 km² yang terbagi ke dalam 29 Kecamatan. Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang di sebelah Timur, Tangerang Selatan dan Lebak di sebelah Selatan, kabupaten Serang di sebelah Barat dan laut Jawa di sebelah Utara. Sumber pendapatan utama daerah berasal dari pertanian dan industri. Beberapa hal di atas, menjadi faktor pendorong tingginya urbanisasi dan perubahan perubahan sosial di masyarakat.

Gambar 1 : Peta Kabupaten Tangerang



1.2 Rencana Pengembangan Ekonomi Pantai Utara

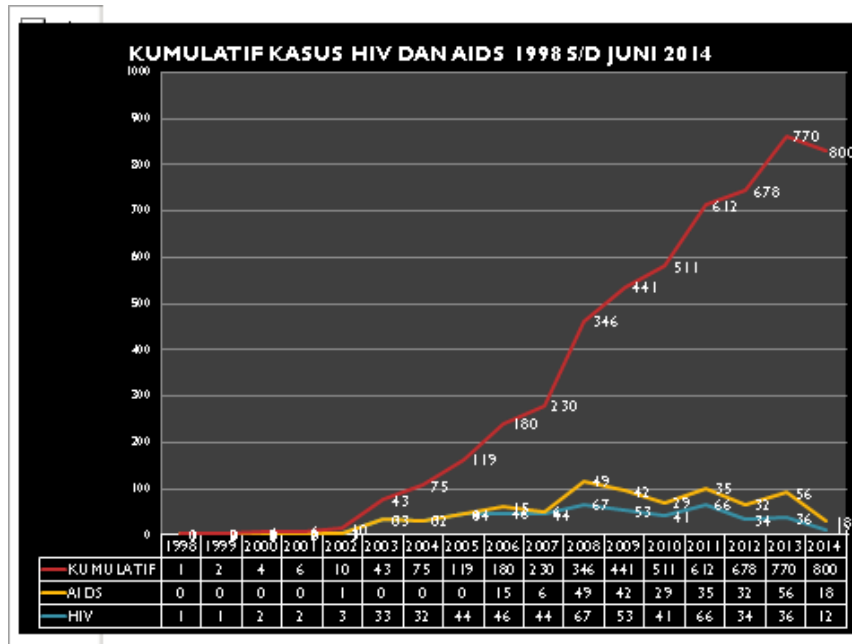
Berdasarkan analisa situasi di wilayah Kabupaten Tangerang, terdapat 1 (satu) Kecamatan yang sangat menjadi perhatian khusus, yaitu Kecamatan Kosambi. Daerah ini terletak di pesisir Utara dan langsung berbatasan dengan DKI Jakarta maupun Kota Tangerang, yang merupakan daerah yang berkembang secara ekonomi dan sosial.

Strategi pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Dadap Ceng'in direncanakan antara pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan PT. Angkasa Pura II. Penertiban ini bertujuan untuk mewujudkan area wilayah ekonomi wisata kelautan dan kuliner, yang diyakini akan menjadi sebuah solusi dalam merubah dan menata ulang kawasan tersebut. Tetapi apakah masyarakat lokal yang ada di Dadap Ceng'in akan mampu mendapatkan keuntungan secara langsung dari perubahan kawasan tersebut, perlu dibuat kajian khusus untuk mengetahuinya.

1.3 Situasi dan Upaya Penanggulangan HIV AIDS Kabupaten Tangerang

Perkembangan ekonomi, sosial dan budaya di daerah Kabupaten Tangerang, juga dibarengi dengan permasalahan sosial yang ada. Salah satu masalah sosial yang muncul terkait dengan kesehatan yaitu kecenderungan meningkatnya temuan kasus HIV AIDS. Gambar grafik di bawah ini menunjukkan data kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu tahun 1998- Juni 2014. Data kumulatif kasus HIV AIDS sampai dengan Juni 2014 sebanyak 800 kasus.

Gambar 2 : Data Kasus HIV AIDS Tahun 1999 s/d Juni 2014



Seperti yang disebutkan dalam website Komisi Penanggulangan AIDS Kabupten Tangerang, KPA KabupatenTangerang mengkoordinasikan berbagai upaya penanggulangan HIV AIDS di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan SK Bupati Nomor : 441/Kep. 490-Huk/2006. Kebijakan pembentukan KPA Kabupaten Tangerang ini lebih dahulu dari pada PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun

2007 tentang pembentukan KPA di tingkat Kabupaten/Kota. Surat Keputusan Bupati tersebut diperbaharui dengan SK Bupati Nomor : 441/Kep.395–Huk/2008 dan yang terakhir dengan SK Bupati Nomor : 441/Kep. 430 – Huk/2011 yang menjadi dasar kerja-kerja penanggulangan HIV AIDS yang dilaksanakan saat ini .

Adapun fokus kerja KPA Kabupaten Tangerang yang dicanangkan saat ini adalah:

- a. Mengurangi laju penularan secepat mungkin, tapi juga tetap memperhatikan upaya jangka panjang melalui penguatan sistem dan kebijakan penanggulangan.
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) serta mendorong Rencana Kerja Daerah tahun 2012–2015 yang diharapkan menjadi kesepakatan dan acuan bersama semua *stakeholders* tingkat Kabupaten.
- c. Melanjutkan dan meningkatkan program peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan konsultasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan program, kebijakan, dan peraturan–peraturan daerah yang efektif yang dilandasi kearifan dan budaya lokal.
- d. Melakukan upaya *Scaling up* (mencuatkan) dari semua kegiatan pencegahan untuk mencapai minimal 60 % populasi rawan, dan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi semua yang membutuhkan.
- e. Membantu Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara anggota PBB yang bermartabat, untuk memenuhi berbagai komitmen internasional seperti UNGASS, MDG's, dan lain-lain.

Salah satu program kerja yang mendapat dukungan dan perhatian, serta menjadi salah satu upaya kerja bersama dalam upaya penanggulangan HIV AIDS paling aktif adalah program yang dilaksanakan di wilayah lokasi Dadap Ceng'in. Upaya kerja bersama ini mendapat momentum dengan terbentuknya Pokja Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS yang beroperasi secara penuh sejak tahun 2013.

Dengan pertimbangan situasi dan latar belakang di atas, KPA Kab Tangerang menganggap penting untuk mendapatkan bahan masukan berupa kajian cepat terhadap rencana penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in. Sebagai bahan masukan dalam penentuan langkah-langkah antisipasi dan perencanaan kerja selanjutnya terkait HIV AIDS dan rencana kerja khususnya, KPA Kabupaten Tangerang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

1.4 Tujuan studi

Tujuan studi peninjauan cepat adalah untuk:

1. Mendapatkan gambaran mengenai rencana dan strategi pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai wacana penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lokal tentang rencana dan wacana penertiban.
3. Mengidentifikasi potensi pengaruh penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in terhadap program pencegahan IMS dan AIDS .
4. Mengumpulkan masukan dan menganalisa rekomendasi dan aspirasi *stakeholder* terkait wacana penutupan/ penertiban lokasi Dadap Ceng'in.

BAB II METODOLOGI

2.1 Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung pada bulan Desember 2014-Januari 2015. Proses pengumpulan data dilakukan oleh tim peninjauan cepat selama bulan Desember 2014 dilanjutkan dengan pengolahan data serta penulisan laporan yang dilakukan pada bulan Januari 2015. Kegiatan Peninjauan cepat dilaksanakan oleh tim yang dipimpin konsultan utama peninjauan cepat dan 3 orang anggota tim peninjauan cepat.

2.2 Pengumpulan Data

Studi dilaksanakan dengan menggunakan metode peninjauan cepat (*Rapid Assessment*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses pengumpulan informasi secara cepat, untuk mendapatkan potret terkini dari berbagai sumber mengenai topik spesifik yang menjadi tujuan studi. Metode peninjauan cepat dipilih dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan sumberdaya untuk pelaksanaan studi. Peninjauan cepat mengutamakan upaya mengidentifikasi hal-hal yang dianggap penting oleh berbagai pihak dan perspektif dari narasumber beragam, serta memanfaatkan hubungan melalui narasumber yang telah tersedia. Pengumpulan data primer dan data sekunder yang difasilitasi oleh tim dari sekretariat KPA Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion (FGD)*/diskusi kelompok terarah, *in-depth interview*/wawancara mendalam, dan observasi kunjungan lapangan. Pengumpulan data primer menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang berisi sejumlah pertanyaan yang pengembangannya telah disepakati dengan pihak KPA Kabupaten Tangerang. Selain itu untuk memperkuat data primer juga dilakukan analisis dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan, laporan program dan informasi dari internet.

Kegiatan FGD dilakukan 5 kali kegiatan pada kelompok yang berbeda. Kelompok FGD pertama adalah kelompok pemangku kebijakan yaitu pimpinan dan staf perwakilan dari Dinas Pemerintahan di Kabupaten Tangerang yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bappeda, dan kemudian diikuti dengan diskusi dengan 2 orang staf dari Satpol Pamong Praja. Kelompok FGD kedua yaitu kelompok masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa jenis pekerjaan yaitu nelayan, tukang ojek, pedagang warung dan ibu rumah tangga serta kader kesehatan. Kelompok FGD ketiga adalah kelompok pelaksana program kesehatan di wilayah Dadap Ceng'in yang terdiri dari perwakilan LSM yang bekerja di isu penanggulangan HIV AIDS dan kelompok FGD keempat yaitu Perwakilan dari pihak pengusaha lokasi hiburan, keamanan dan pemilik/pengelola wisma/kafe.

Sebuah kegiatan diskusi kelompok terarah juga dilakukan pada kelompok WPS (Wanita Pekerja Seks) yang diikuti oleh 5 orang perempuan. Sebagian WPS yang berstatus tinggal di lokasi Dadap (di kafe) dan beberapa orang lagi berstatus *'freelance'*, tapi berstatus kos di sekitar lokasi.

Pemilihan jenis kelompok yang mengikuti kegiatan diskusi kelompok terarah dilakukan bersama pihak KPA Kabupaten Tangerang. Pemilihan narasumber dan lembaga yang disertakan dalam diskusi kelompok terarah mempertimbangkan untuk mendapatkan keragaman latar belakang yang optimal dari para narasumber.

Selama proses pengumpulan data sejumlah kegiatan wawancara mendalam dilaksanakan dengan menggunakan informan yang direkomendasikan oleh pihak sekretariat KPA Kabupaten Tangerang. Kegiatan *in-depth Interview* dilakukan sebanyak 2 kali kepada tokoh masyarakat sebagai perintis dibukanya wilayah Dadap Ceng'in dan kepada Narasumber dari Dinas Kabupaten Tangerang. Dua wawancara mendalam dilakukan masing-masing pada koordinator sekretariat KPA Kabupaten Tangerang dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Masing-masing wawancara mendalam dilakukan juga menggunakan informan dari LSM yang bekerja di Dadap Ceng'in dan seorang informan dari perwakilan Pokja HIV AIDS.

2.3 Analisa Data

Pendokumentasian pada pengumpulan data lapangan dilakukan oleh tim peneliti melalui catatan yang disusun pada setiap kegiatan wawancara dan diskusi kelompok terarah yang dilakukan. Selain catatan yang berisi pendapat dan jawaban yang diberikan informan, catatan-catatan kesan dan pemahaman baru dari tim pengumpul data juga disertakan dalam catatan-catatan lapangan.

Proses analisa data dilakukan dalam sebuah workshop analisa data yang diikuti oleh seluruh anggota tim peninjauan cepat. Proses analisa data diawali dengan diskusi tim peneliti secara umum, mengenai kesan yang diperoleh dari proses pengumpulan data lapangan. Proses mendiskusikan kesan umum dari masing-masing anggota tim menjadi penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih obyektif tentang realita yang dipahami bersama dari proses peninjauan cepat. Setelah itu dilakukan pengelompokan tema-tema jawaban yang muncul didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses pengumpulan data. Masing-masing anggota tim, membuat catatan berdasarkan pengelompokan jawaban dari para informan di lapangan.

Bagian ini menjadi bagian yang kaya dan menjadi temuan-temuan peninjauan cepat. Pada bagian akhir dilakukan diskusi untuk menyusun pemahaman bersama dari tim peneliti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan utama penelitian, serta menyusun rekomendasi yang relevan sebagai bagian hasil proses peninjauan cepat.

2.4 Kegunaan dan Keterbatasan Penjajakan Cepat

Dalam proses diskusi yang dilakukan dengan pihak KPA Kabupaten Tangerang dan berbagai narasumber dalam proses penjajakan cepat, seluruh pihak menyatakan belum pernah melihat laporan tertulis atau kajian tertentu yang pernah dilakukan terkait dengan wacana penertiban ataupun penutupan lokasi Dadap Ceng'in. Hal ini menjadikan studi ini merupakan dokumentasi tertulis yang dapat menjadi acuan sebagai informasi awal dan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang kiranya akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penentuan kebijakan dan operasional program terkait di masa mendatang.

Data utama yang digunakan dalam penjajakan cepat adalah berbagai informasi yang diperoleh secara langsung, melalui kegiatan diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam, kesan yang diperoleh dalam observasi lapangan, serta data pendukung yang disediakan oleh sekretariat KPA Kabupaten Tangerang selama studi dilaksanakan. Karena tujuan dari penjajakan cepat adalah mendokumentasikan berbagai opini dari perspektif informan yang bervariasi selama proses pengumpulan data, ada kemungkinan akurasi atau ketepatan informasi yang diperoleh belum tentu merupakan informasi yang sesungguhnya, atau belum mewakili keragaman jawaban yang mungkin muncul. Karena itu dalam menyikapi berbagai informasi yang disajikan, diperlukan pertimbangan lebih jauh dari pihak-pihak yang akan menggunakan informasi dari laporan penjajakan cepat. Misalnya dengan mengecek kembali melalui informasi-informasi yang lain yang mungkin tersedia, informasi terbaru, atau membandingkan dengan sumber-sumber informasi lainnya.

BAB III

HASIL PENJAJAKAN CEPAT

3.1 Sejarah Berdirinya Daerah Dadap Ceng'in

Lokasi Dadap Ceng'in berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Daerah ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang dan pantai utara pulau Jawa. Wilayah ini berkembang di atas tanah milik pemerintah daerah, menempati kawasan yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

Lokasi Dadap pada 35 tahun lalu, hanya berupa kampung nelayan kecil, berubah menjadi wilayah tempat tinggal, sekaligus menjadi lokasi hiburan malam. Lokasi ini menjadi istimewa karena berstatus lokasi hiburan terbesar di Kabupaten Tangerang.

Lokasi ini berawal dari adanya penutupan Muara Karang untuk pembangunan perumahan pluit pada tahun 1975. Kemudian sebagian masyarakatnya (sekitar 70 KK) yang mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan pindah ke wilayah Dadap (masih di pantai Utara). Sebelumnya wilayah ini hanya hutan yang terletak di muara laut dengan kondisi gelap dan tanpa penghuni.

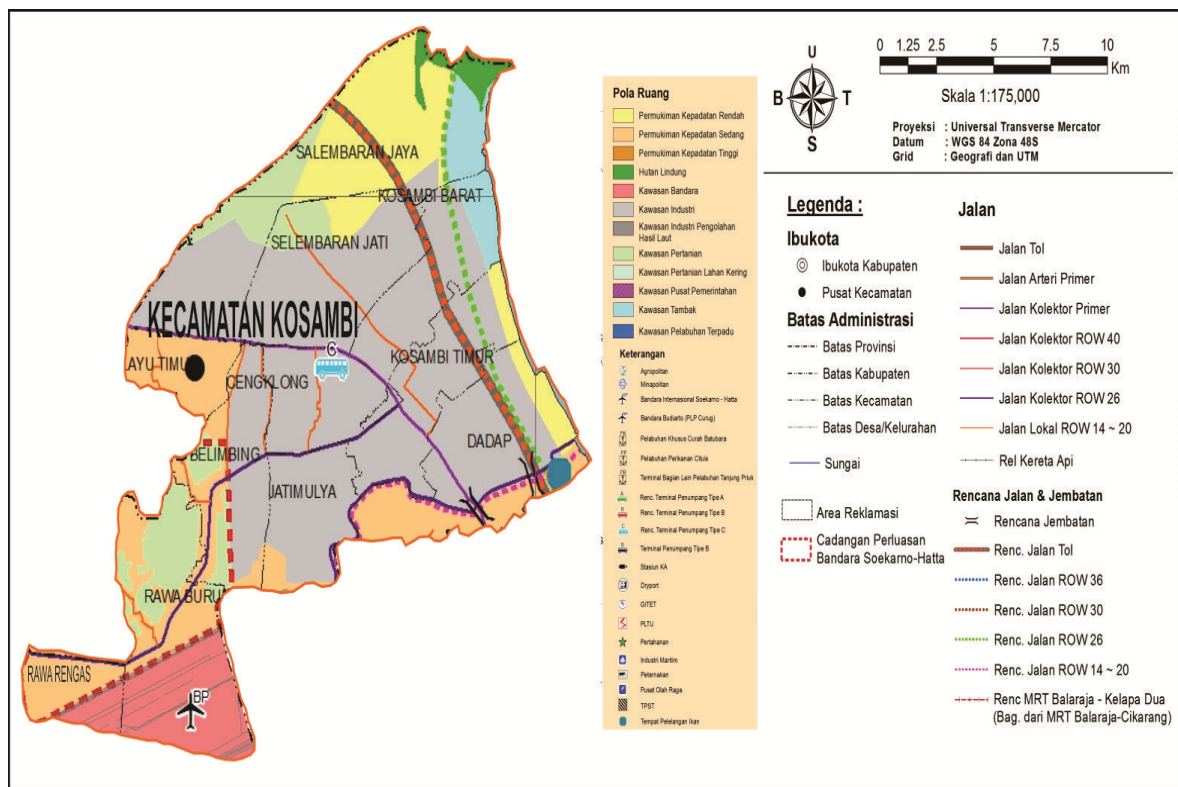
Kehadiran Lokasi ini tidak lepas dari sejarah pembangunan Bandara Sukarno Hatta. Sehubungan dengan adanya pembangunan itu, banyak pekerja yang berasal dari Perancis mempunyai kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan mencari hiburan. Kemudian ada kebutuhan dari para pekerja yang meminta untuk disediakan beberapa orang wanita penghibur dari wilayah Pantura Jawa (Cilamaya). Berawal dari sebuah warung yang dikhususkan untuk keperluan tersebut, lama-kelamaan wilayah Dadap Ceng'in kemudian berkembang hingga saat ini menjadi puluhan kafe yang juga menyediakan wanita penghibur.

“ Di sini banyak pegawai bandara dari Prancis yang membangun airport. Jadi mereka sering beristirahat ke warung yang satu itu, saya menyuruh pedagang namanya bapak Mursali untuk berdagang nasi dan ada pelayan ..sehingga disediakan pembantu sampai 7 orang dari Cilamaya. ...Karena orang Prancis ini pengen happy-happy ...karena ada WPS yang melayani bule itu, petugas masjid gerah dan menyarankan kepada pak Embing agar pelayan itu dikasih sebuah tempat khusus yaitu sebuah rumah untuk melayani orang-orang perancis tadi. Sehingga orang-orang itu terus berdatangan, satu demi satu. Kemudian bangun lagi satu rumah, lalu tambah dan semakin banyak..” (Tokoh lokal, Interview).

Dalam sejarah perkembangan sebagai lokasi hiburan malam, daerah Dadap dan sekitarnya dari dulu hingga saat ini sudah berulang kali dilakukan penertiban. Bahkan sudah pernah mengalami kebakaran besar. Namun masyarakat yang melihat tidak ada reaksi yang sungguh-sungguh dari pemerintah setempat, kembali membuat bangunan-bangunan baru dan membuat wilayah tersebut tumbuh kembali.

Pada tahun 1984, dengan adanya pembongkaran lokasi dari Tanah Abang, sebagian orang pindah ke wilayah Dadap sehingga tempat ini menjadi ramai dan sempat menjadi kawasan tidak aman. Pada waktu itu setiap 2-3 bulan sekali diadakan razia. Menurut cerita dari warga yang sudah lama bermukim, pada kisaran tahun 1997-1998 jumlah kafe-kafe yang beroperasi banyak dan suasana ramai sekali. Tahun 1998 pernah pula dilakukan penggusuran besar besaran. Lokasi Dadap sempat selama 2 tahun terbengkalai dan hampir tidak berpenghuni. Tapi setelah itu, sejak tahun 2001 kafe-kafe dan karaoke sudah ramai dibangun kembali.

Gambar 3. Peta Geografis Kecamatan Kosambi



3.2 Gambaran Lokasi Dadap.

Lokasi Dadap Ceng'in saat ini sudah menjadi tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai kegiatan masyarakat yang melingkupi lebih dari 700 KK yang menetap. Lokasi Dadap Ceng'in meliputi 2 RW, dan 3 RT, yang secara ekonomi dan sosial mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Infrastruktur berupa jalan, perumahan, air bersih telah terbangun dan berkembang sesuai dengan kemampuan warga. Secara fisik, gambaran lokasi Dadap Ceng'in terdiri dari bangunan rumah penduduk bercampur dengan rumah makan/kafe-kafe hiburan orang dewasa (karaoke) menjadi sebuah perkampungan.

Masyarakat Dadap Ceng'in adalah penduduk yang sudah menetap selama puluhan tahun sejak lokasi ini berkembang, dan juga penduduk yang tidak menetap. Pada umumnya pendatang ini menetap karena pekerjaannya sebagai nelayan, bekerja di kafe-kafe, atau pekerjaan yang tergantung dari keberadaan kafe.

Kegiatan ekonomi yang berjalan didasari keberadaan hiburan dan perempuan malam. Di lokasi Dadap Ceng'in saat ini terdapat sekitar 60-an kafe besar dan kecil yang beroperasi di jalan utama sepanjang sekitar 1 kilometer. Pada siang hari, situasi tak berbeda dengan wilayah perlintasan pada umumnya. Namun saat malam hari, lokasi ini ramai terdengar suara musik dari kafe-kafe lokasi hiburan yang ada. Jenis kegiatan ekonomi antara lain usaha kafe, kontrakan, losmen, warung makan (besar kecil), usaha lahan parkir, tukang parkir, keamanan, tukang cuci dan tukang air.

Data dari keberadaan pekerja hiburan di Dadap Ceng'in tidak ada jumlah yang pasti. Menurut informasi yang disampaikan dari kelompok kerja program HIV yang bekerja di Dadap, terdapat sekitar tidak kurang dari 350an orang pekerja hiburan yang bekerja dan bertempat tinggal di tempat-tempat hiburan di seputar Dadap Ceng'in. Terdapat sekitar 300an orang pekerja hiburan yang juga bekerja di wilayah tersebut tapi dengan status *freelance*. Artinya, perempuan ini bekerja di wilayah yang sama, tapi tidak berstatus tinggal di tempat-tempat hiburan. Berarti diperkirakan terdapat sekitar 600-700 pekerja hiburan dalam waktu yang bersamaan (misalnya dalam sebulan) yang bekerja di lokasi Dadap Ceng'in. Jumlah ini tentu saja bisa naik turun dari waktu ke waktu, karena sebagian dari para perempuan tersebut juga memang kerap berganti tempat kerja ke lokasi-lokasi yang lain. Menurut salah satu informan diperkirakan dalam setahun ada sekitar 1000 orang wanita yang berganti keluar masuk sebagai pekerja hiburan di lokasi Dadap Ceng'in.

Keberadaan lokasi Dadap Ceng'in, menurut masyarakat di sekitar mempunyai hubungan yang saling menguntungkan dengan pemilik tempat hiburan/kafe. Selain memberi lapangan pekerjaan, pemilik kafe juga menjaga hubungan yang baik dengan warga sekitar dengan memberikan santunan rutin dari pengusaha hiburan untuk keperluan warga. Misalnya iuran untuk pembangunan fasilitas umum, santunan kematian jika ada warga meninggal dunia dan bantuan untuk kegiatan rutin warga seperti pesta laut, peringatan hari kemerdekaan dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain.

Keberadaan lokasi hiburan dalam operasional kegiatan hariannya juga melibatkan pihak keamanan dan warga yang berguna untuk memperkecil potensi konflik-konflik yang dapat muncul. Pemilik kafe memberikan dukungan dana keamanan kepada pihak keamanan secara teratur kepada pihak-pihak yang bertindak sebagai pengelola keamanan dan yang mengumpulkan dana-dana sosial bagi masyarakat.

Selain partisipasi dari para pengusaha hiburan yang disebutkan diatas, beberapa kesepakatan lokal juga terbentuk antara warga setempat dengan para pemilik/pengelola tempat hiburan. Adapun contoh ketentuan yang telah disepakati antara warga dan pemilik usaha hiburan, antara lain:

- o Setiap bulan Ramadhan kegiatan hiburan malam tutup total.
- o Setiap malam Senin kegiatan hiburan tutup dikarenakan adanya pengajian warga.
- o Setiap malam Jumat kegiatan hiburan boleh buka, tapi tidak diijinkan menghidupkan musik.
- o Tidak menghidupkan musik pada saat ada warga yang meninggal.
- o Kegiatan kafe sehari-hari dimulai pukul 13.00 sampai dengan menjelang pagi hari.

Menurut perspektif dari staf LSM yang bekerja di lokasi Dadap, masyarakat di Dadap sangat bergantung dengan keberadaan lokasi dan WPS. Ketergantungan warga terhadap keberadaan lokasi hiburan sudah sangat tinggi, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan pembinaan. Disebutkan juga bahwa dari sekian banyak perempuan yang bekerja di wilayah dadap tidak tertutup kemungkinan ada terjadi kegiatan yang bisa dimasukkan dalam kategori *trafficking* atau perdagangan manusia. Dimana adanya kemungkinan masalah hutang piutang yang harus dibayar oleh WPS sehingga mengakibatkan kesulitan bagi si perempuan untuk keluar dari pekerjaan yang dijalannya.

Beberapa informan menyebutkan bahwa ada keunikan dari situasi lokasi Dadap Ceng'in dibandingkan dengan lokasi-lokasi tempat hiburan di wilayah-wilayah lain. Disebutkan bahwa secara umum, hubungan kerja antara para perempuan (WPS) yang bekerja di Dadap memiliki hubungan yang lebih seimbang dibandingkan dengan tipe hubungan kerja sejenis di lokasi-lokasi lain. Para pekerja hiburan, cenderung memiliki kontrol yang lebih besar terhadap dirinya dalam kaitan kegiatan transaksi seks pada pelanggan. Para pengelola/pemilik kafe, tidak mengharuskan secara tegas pada seorang WPS untuk melayani tamu, jika WPS tersebut memang tidak berkenan untuk melayani pelanggan yang ingin mengajak/menggunakan jasa seksualnya. Pemilik atau pengelola mendapat bayaran 'sewa kamar' untuk setiap tamu yang dibawa sorang WPS. Disebutkan, misalnya besaran sewa kamar yang akan diperoleh pemilik/pengelola kafe adalah sebesar 50.000 rupiah per tamu yang diterima oleh si WPS. Sementara mengenai harga jasa layanan, tergantung dari kesepakatan WPS dengan tamunya. Disebutkan oleh salah satu informan bahwa harga jasa transaksi seks di Dadap adalah sekitar Rp 250.000-350.000 per layanan *short time*.

Gambar 4. Gambaran lokasi Dadap Ceng'in .



3.3 Ketergantungan Masyarakat Secara Ekonomi dengan Lokasi Dadap Ceng'in

Kejelasan tentang bagaimana besaran hubungan, keterkaitan antar pelaku ekonomi dan sosial yang berada di lokasi Dadap Ceng'in akan membantu dalam perencanaan penertiban dan lokasi Dadap. Oleh sebab itu, pendataan dengan lebih terstruktur menjadi bagian yang penting untuk membuat rencana penertiban berjalan dengan baik dan efektif.

Keberadaan lokasi hiburan malam yang berada di sepanjang jalan utama Dadap Ceng'in menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka banyak yang secara langsung ataupun tidak langsung tergantung dari keberadaan lokalisasi ini. Serapan tenaga kerja meliputi pemilik/pegawai warung makan, pedagang warung kelontong, pegawai bank keliling, supplier makanan minuman, keamanan, juru parkir, tukang ojeg, tukang air, tukang cuci dan setrika, penyewa kos-kosan, tukang parkir dan lain sebagainya.

Berbagai jenis pekerjaan yang ada disekitar lokasi Dadap Ceng'in, merupakan sumber utama bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya untuk mendapatkan penghasilan. Di bawah ini merupakan perhitungan jumlah orang yang tergantung dengan keberadaan lokasi Dadap Ceng'in secara langsung maupun tidak langsung. Pada Tabel 1. Dibawah ini memberi gambaran perkiraan jumlah orang yang tergantung secara langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan lokasi Dadap Ceng'in.

Tabel 1. Perkiraan jumlah orang yang tergantung dari keberadaan lokasi Dadap Ceng'in.

No	Sumber perhitungan	Perhitungan	Jumlah
1	WPS-pekerja kafe	10 orang x 60 kafe	600 orang
2	Pemilik kafe	60 orang pemilik kafe	60 orang
3	Keluarga pemilik kafe	60 kafe x 4 orang anggota KK/Pemilik kafe	240 orang
4	Keluarga WPS-600 orang	600 WPS x 4 orang anggota KK/WPS	2.400 orang
5	Warga Dadap sekitar 700 KK yang ada	700 KK *40% yang tergantung x 4 Anggota KK	1.120 orang
	Total		4.320 orang

Dari beberapa jenis pekerjaan yang ada di lokasi Dadap Ceng'in, dapat dibuat perhitungan seberapa besar perputaran uang yang beredar. Perputaran uang yang ada muncul dari akibat keberadaan lokasi hiburan maupun turunan dari kebutuhan para WPS yang direspon oleh masyarakat disekitar. Tabel di bawah ini adalah sebagai ilustrasi perhitungan kasar perputaran uang di wilayah Dadap per bulannya dari beberapa jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang ada.

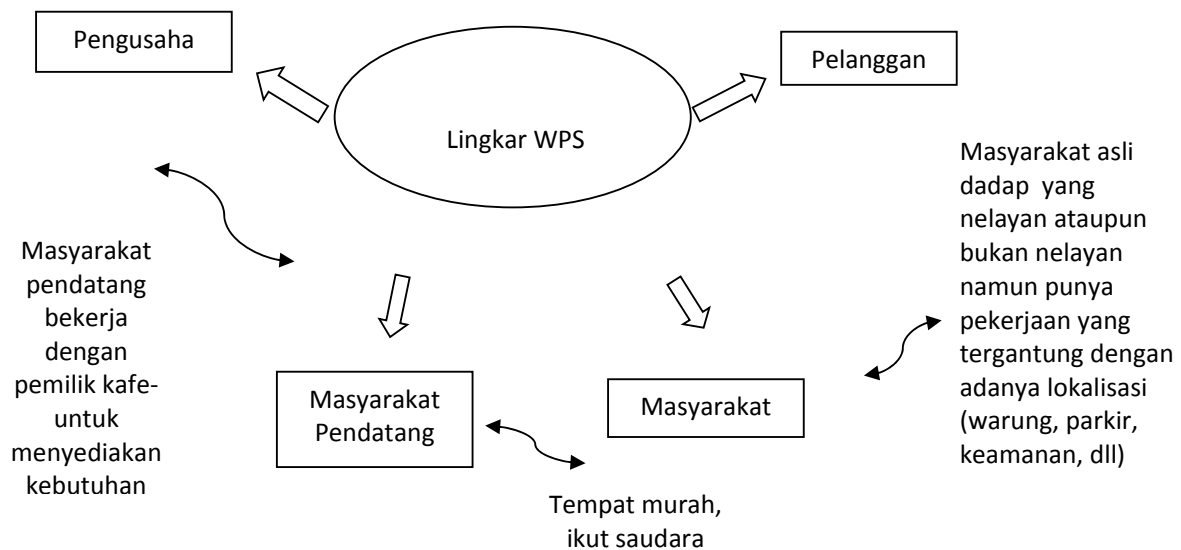
Tabel 2. Perkiraan Perputaran Uang di lokasi Dadap Ceng'in

No	Sumber perhitungan	Perhitungan	Jumlah per bulan
1	Penghasilan WPS-600 orang	600 WPS x 2 tamu x Rp 350.000/malam x 20 hari/bulan	Rp 8.400.000.000
2	Penghasilan pemilik kafe	60 kafe x Rp 10.000.000/bulan	Rp 600.000.000
3	Pemilik kontrakan	300 rumah x Rp 500.000/bulan	Rp 150.000.000
4	Tukang ojek	Rp 150.000/hari x 20 hari/bulan	Rp 3.000.000
5	Omzet pemiliki warung Rp 1.5 juta/hari dengan modal, keuntungan bersih sekitar Rp 200.000/hari	Rp 200.000/hari x 20 hari/bulan	Rp 4.000.000
Kegiatan ekonomi untuk memenuhi Kebutuhan WPS			
NO			
1	Kebutuhan makan, Rp 50.000/hari	600 WPS x Rp 50.000 x 30 hari	Rp 90.000.000
2	Kebutuhan biaya di luar makan untuk keamanan, iuran lain- Rp 200.000/bulan	600 WPS x Rp 200.000	Rp 120.000.000
3	Kirim ke kampung 3-5 jt/bulan (rata rata 4 juta)	600 WPS x 4 juta/bulan	Rp 2.400.000.000
4	Iuran ke mami Rp 50.000/klien	600 WPS x Rp 50.000 x 2 klien	Rp 60.000.000
5	Biaya kontrak kamar pekerja yang tinggal di luar tempat hiburan	300 WPS X Rp 500.000/bulan	Rp 150.000.000

Gambar 5. di bawah ini menunjukkan bagaimana hubungan berbagai kelompok yang saling terkait dan saling tergantung antara berbagai aktor masyarakat di lokasi Dadap Ceng'in. Keberadaan WPS diilustrasikan sebagai pusran dari keberadaan lokasi memberikan peluang usaha bagi para pemilik modal untuk mengembangkan usaha hiburan (kafe, karaoke, penyewaan tempat kengan). Karena keberadaan lokasi hiburan timbul kegiatan ekonomi lain.

Lapangan pekerjaan yang muncul lapangan kerja untuk mereka yang membantu sebagai tukang parkir, penjaga keamanan. Karena semakin banyak yang mendapat manfaat, kegiatan ekonomi juga berkembang pada penyediaan warung makan, warung kelontong kebutuhan sehari-hari dan penyediaan jasa antara warga (tukang cuci, tukang air, sewa kamar, kontrakan, dan lain-lain). Saling keterkaitan ini berkembang dengan penyediaan kebutuhan bagi para tamu yang datang ke lokasi. Selain mencari hiburan, tamu juga menyediakan lapangan pekerjaan secara tidak langsung pada kehadiran tukang parkir atau para penjaga/kemanan di sekitar lokasi.

Gambar 5: Keterkaitan masyarakat Dadap dan Lokasi Dadap Ceng'in



3.4 Program-program kesehatan dan sosial

Lokasi Dadap Ceng'in termasuk dalam wilayah kerja administrasi Kecamatan Kosambi, Kelurahan Dadap, dan untuk Kamtibmas berada di bawah wilayah kerja Polsek Dadap. Untuk

program terkait Kamtibmas, seperti juga wilayah lokasi hiburan malam lainnya, di wilayah Dadap kadangkala juga terjadi keributan atau tindak kriminal. Untuk mencegah terjadinya keributan ini menjadi dasar dilakukannya kegiatan penertiban atau razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Penertiban besar pernah dilakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tapi tidak berpengaruh besar pada upaya untuk menertibkan secara permanen atau tidak memiliki pengaruh untuk masa yang panjang. Karena setelah menjadi sepi beberapa waktu, karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil pemerintah, lokasi tersebut kembali dibangun sebagai tempat usaha hiburan malam.

Untuk program kesehatan berada di bawah koordinasi dengan Puskesmas Kosambi di dukung oleh bantuan dari LSM. Beberapa lembaga yang aktif dalam berkegiatan antara lain Yayasan BMG (Bina Muda Gemilang) yang bekerja untuk kegiatan penjangkauan dan pemberian rujukan, Yayasan Edelweis dan Yayasan Kotex yang bekerja untuk kegiatan pendampingan bagi ODHA.

Secara umum peserta diskusi menyebutkan bahwa kegiatan layanan-layanan publik yang disediakan atau diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah untuk lokasi Dadap Ceng'in dapat dikatakan hampir tidak ada, atau sangat terbatas kecuali kegiatan layanan kesehatan masyarakat berbasis penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan AIDS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, KPA Kabupaten Tangerang dan LSM.

Kegiatan dari Dinas Sosial bidang rehabilitasi dan pelayanan, menyebutkan bahwa terkait dengan penanganan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pihaknya melakukan pembekalan kepada WPS untuk tidak kembali bekerja sebagai WPS. Kegiatan pembekalan seperti keterampilan salon, pembuatan kue dilakukan sekitar 2x/tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan yang dilakukan pada pekerja seks yang ditahan melalui kerja sama dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu Dinas Sosial juga menerima rujukan dari penangkapan satpol PP kemudian pembinaan di panti sosial dan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk kegiatan keterampilan tersebut di atas.

Kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, berfokus pada konteks pencegahan pada komunitas muda, serta mulai memikirkan untuk masyarakat yang selama ini mempunyai kepentingan terkait lokasi Dadap. Tapi sampai saat ini belum tersedia kegiatan atau program tertentu yang dijalankan secara aktif untuk lokasi Dadap Ceng'in.

Dilihat dari besaran penanganan program HIV di wilayah Kabupaten Tangerang, Puskesmas Pembantu Dadap memberi kontribusi hasil kerja jumlah penanganan kasus IMS tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan IMS lebih memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah Dadap jika dibandingkan dengan keberadaan lokasi-lokasi yang lain. Hasil kerja sama

berbagai pihak, yang meliputi Dinkes melalui Puskesmas Pembantu, LSM yang bekerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, pihak pemerintah lokal (kelurahan, kepolisian, tokoh masyarakat) dan warga, membuah hasil kerja yang layak dijadikan sebagai contoh penanggulangan AIDS.

Program kesehatan yang ada di lokasi Dadap Ceng'in dijalankan oleh Puskesmas Pembantu (Pustu) yang pada awalnya dilaksanakan untuk penyediaan kesehatan dasar bagi masyarakat umum. Namun perkembangan selanjutnya, kegiatan layanan Pustu juga melakukan pemberian informasi terkait kesehatan khususnya IMS dan HIV AIDS kepada para pekerja kafe/WPS dan pelanggan WPS, serta penyediaan pelayanan pemeriksaan tes HIV sukarela/VCT melalui *mobile klinik*. Di bawah ini menunjukkan jumlah penanganan kasus IMS yang dilakukan oleh instansi kesehatan di Kabupaten Tangerang dan jumlah terbanyak ada di wilayah Kecamatan Kosambi.

Gambar 6. 12 PKM dengan kasus IMS terbanyak Tahun 2013 di Kab. Tangerang.



Menurut informasi dari Dinkes, pada awalnya untuk pendekatan kepada pekerja hiburan yang berada di kontrakan (WPS) dalam melakukan mobile VCT mendapat hambatan oleh ormas lokal dan pemilik kafe. Masalah ini dapat diatasi setelah dilakukan kerja bersama antara LSM yang melakukan kegiatan menjangkau kelompok WPS yang membangun komunikasi dan pendekatan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu LSM yang bekerja dalam upaya penanggulangan HIV antara lain LSM BMG untuk kegiatan penjangkauan, LSM kotex, dan kelompok dukungan sebaya “Edelweis” untuk pendampingan pada orang yang telah terinfeksi HIV AIDS (ODHA). LSM BMG melakukan kegiatan yang meliputi penjangkauan, pemberian informasi IMS dan HIV/AIDS. dan menyediakan material pencegahan infeksi HIV seperti pelicin dan kondom. Terkait dengan kegiatan pendampingan kepada ODHA, diakui oleh para pelaksana program bahwa kegiatan tersebut belum dapat dilakukan dengan efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan karena biasanya setelah seseorang mengetahui status HIVnya positif atau sudah terinfeksi HIV, maka dia akan segera keluar dari lokasi Dadap.

“ ...Di Dadap untuk pendampingan ODHA kurang maksimal. ODHA di sana begitu status HIV nya muncul mereka akan pergi. Begitu kita datang mereka nggak ada. ..” (R- KDS Edelweis)

Program dari Dinas Kesehatan, di lokasi Dadap fokus kepada proses pengobatan medis untuk WPS yang terindikasi memiliki IMS, kegiatan sosialisasi pencegahan HIV untuk seluruh masyarakat, mucikari, PSK dan Kader rutin biasanya dilakukan, terutama setelah idul fitri. Kegiatan yang dilakukan rutin antara lain menyeleggarakan kegiatan layanan:

- Pemeriksaan IMS rutin 3-6 bulan sekali/bln/WPS.
- Pemberian layanan kesehatan dasar di Puskesmas pembantu Dadap Senin s/d Kamis.
- Pemeriksaan HIV rutin 3-6 bulan sekalan/bln/WPS.
- Rujukan untuk kasus HIV ke RSUD Tangerang (Gratis) dengan sistem reimbres .
- Pemberian layanan pre ARV @Rp 1.500.000/Pasien.
- Mengalokasikan dana pre ARV (APBD) untuk 100 orang WPS positive pada tahun 2014 dan hanya terserap oleh 7 orang. (tingginya tingkat stigma serta ketakutan membuat status pada komunitas WPS).
- Membangun sistem monitoring dengan membuat Kartu Menuju Sehat (buku saku) khusus untuk pemeriksaan rutin WPS.
- Membentuk kader kesehatan untuk HIV yang terintegrasi pada sistem kesehatan masyarakat yang sudah ada di wilayah Dadap (kader posyandu) yang dilatih.
- Membentuk pokja lokasi bekerjasama dengan kecamatan dan berkoordinasi bersama KPA Kabupaten Tangerang.

Keberadaan lokasi Dadap memberi dukungan yang positif dalam pelaksanaan program HIV. Keberadaan lokasi Dadap memudahkan proses intervensi kesehatan mulai dari penjangkauan dan pendampingan yang terkonsentrasi dan terintegrasi pada penyediaan layanan IMS dan HIV yang

terpadu dengan mengadakan pelayanan di Puskesmas pembantu Dadap. Serta memudahkan untuk melakukan mobilisasi masyarakat sekitar lokasi untuk mendukung program, antara lain dengan terbentuknya kelompok kerja (Pokja HIV) pada tahun 2011 dimana tokoh masyarakat dari lokasi Dadap terlibat di dalam Pokja tersebut. Selain itu Pokja HIV juga terlibat di dalam penyediaan kondom sebagai alat pencegahan infeksi dengan terlibat sebagai pengelola outlet kondom bekerjasama dengan KPA Kabupaten Tangerang.

Dari hasil FGD kepada pelaksana program HIV, diperkirakan dari jumlah WPS di lokasi Dadap Ceng'in kira-kira ada 600-700 orang, sebanyak 50% nya pernah terpapar dengan program HIV dari LSM atau sekitar 300-an orang, dan kurang lebih 50 orang sudah teridentifikasi terinfeksi HIV. Pada awal mula berjalannya program HIV, bagi yang terinfeksi HIV langsung menghilang dan berpindah tempat. Namun demikian, pada saat ini sudah mulai ada pemahaman dan penerimaan status terinfeksi HIV dari "mami" para pekerja seks.

"...ODHA yang diketahui ada 50-an orang. Ketika masuk pra ARV mereka menghilang. Karena ada stigma dan diskriminasi di antara teman-temannya. Cuma berapa persen yang akses. Tetapi sekarang beberapa maminya sudah welcome dengan ODHA nya." (IPPI)

"...Dulu ketika belum tau informasi HIV mereka langsung dipulangkan oleh mucikarinya. Kalau mereka ketemu dengan orang kesehatan sudah ada anggapan dari warga kalau mereka sudah kena...."

Dengan adanya wacana penertiban lokasi Dadap Ceng'in, menurut pelaksana program HIV akan menimbulkan dampak negatif pada pelaksanaan program HIV yang sudah berjalan selama ini. Dampak tersebut antara lain akan menyebarkan para pekerja ke komunitas masyarakat (lokasi baru), sehingga sulit mengidentifikasi kembali mana pekerja yang berisiko untuk terinfeksi HIV dan untuk keperluan program pendidikan dan pelayanan kesehatan terkait HIV perlu dilakukan pemetaan awal dari nol untuk mengidentifikasi keberadaan pekerja seks dan memungkinkan potensi meningkatkan penularan pada populasi umum.

3.5 Persepsi Wacana Penertiban Lokasi Dadap Ceng In

3.5.1 Persepektif pemerintah

Rencana penertiban lokasi Dadap Ceng'in secara jelas belum diketahui oleh jajaran pemerintahan daerah. Dari BAPPEDA (Bidang Kesehatan dan Sosial), menyatakan belum memiliki informasi khusus terkait penertiban lokasi Dadap, pembicaraan tentang penutupan melalui

Sekretaris Daerah. Namun demikian, dari beberapa jajaran pemerintah yang menjadi narasumber menyatakan beberapa sikap dan rencana terkait dengan penutupan sesuai dengan fungsi dan peran kelembagaannya masing-masing.

Dari Dinas Kesehatan terkait rencana penertiban yang terutama adalah, akan selalu mengikuti kebijakan Pemda apakah akan ditutup/tidak, akan membuat pemetaan ulang guna memperkirakan mobilisasi WPS ke lokasi baru dan membuat strategi intervensi pada lokasi yang kemungkinan akan jadi tempat lokasi pindahan seperti di Cisoka, Taman Adyasa, Cikupa, Balaraja dan Serang, sebagai pembelajaran dari penutupan lokasi Sungai Tahang. Sedangkan dari Bappeda Kabupaten Tangerang akan melakukan penataan tata ruang untuk lokasi Dadap dengan melakukan pendekatan perekonomian, mengikuti pendekatan seperti di Bandung, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta akan membuat jaring pengaman ekonomi khusus untuk masyarakat Kabupaten Tangerang (pribumi), pembinaan akan dilaksanakan sebelum penutupan lokasi. Tahapan pembinaan, pembekalan dan pemulihan akan disesuaikan dengan anggaran dan diharapkan akan dibentuk suatu tim untuk perencanaan penutupan lokasi dadap.

Rekomendasi yang muncul dari kelompok pemerintah daerah tentang rencana penertiban lokasi Dadap antara lain: perlunya ada perencanaan yang *holistic* sampai dengan rencana aksi, perlu komitmen bersama dan seluruh tahapan harus satu komando dari Bupati/Sekda dengan pembagian tupoksi khusus sesuai SKPD. Khusus untuk Dinsos dan Dinkes perlu meningkatkan akses pada layanan-layanan sosial (KUBE, UEP), penguatan panti-panti sosial.

3.5.2 Perspektif pemilik lokasi hiburan/ pekerja kafe

Para pemilik usaha hiburan mengaku sudah kerap kali mendengar adanya rencana penutupan lokasi. Bahkan beberapa bulan terakhir sudah dilakukan pengukuran jalan di area lokasi. Rencana penertiban seringkali terdengar, namun tidak pernah terjadi realisasi sehingga para pemilik hiburan cenderung mengabaikan desas-desus tersebut.

Terkait rencana penertiban pengusaha hiburan dan pihak keamanan mengharapkan ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh pemerintah antara lain perlu adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah, ada prinsip pelib dalam musyawarah, transparansi dalam semua proses kegiatan, jangan ada proses yang terselubung untuk kepentingan pihak swasta (*developer*), perlu untuk memikirkan ganti rugi bagi bangunan-bangunan yang permanen, ada rencana relokasi warga asli ke wilayah yang lebih layak dan memikirkan mata pencaharian lain untuk warga yang selama ini hidupnya tergantung pada lokasi hiburan.

3.5.3. Perspektif perwakilan masyarakat sekitar lokasi Dadap Ceng'in

Pandangan masyarakat di sekitar wilayah Dadap Ceng'in terhadap lokasi hiburan malam dapat digolongkan menjadi 2 (dua) cara pandang, yaitu masyarakat yang tidak menerima dan masyarakat yang menerima kondisi akan adanya lokasi hiburan malam. Kelompok ke dua cenderung menerima keberadaan lokasi karena sumber ekonominya tergantung dari adanya lokasi ini.

Terdapat fenomena menarik di wilayah ini, dimana kelompok masyarakat yang masih memegang teguh norma dan religi, melalui *stake holder* lokal mereka meminta semua pengusaha lokasi hiburan malam tidak melakukan aktifitas yang dapat membuat hingar-bingar (*sound system*) di setiap senin malam dan kamis malam. Pada dua malam tersebut masyarakat lokal melakukan pengajian dan ceramah, sehingga pengusaha hiburan pun mematuhi untuk tidak menghidupkan *sound system* musik. Dapat diartikan masih adanya pola normatif yang masih ingin dipertahankan oleh masyarakat lokal yang ada di wilayah Dadap Ceng'in.

Dari hasil diskusi kelompok dengan perwakilan masyarakat, tukang ojek, pemilik kontrakan dan pedagang menyatakan tidak setuju lokasi ditutup. Alasan yang paling kuat karena mereka secara ekonomi sangat tergantung dari keberadaan kafe ini. Terkait isu penertiban, mereka mengharap ada kejelasan dari pemerintah terkait ganti rugi, baik itu penyediaan lahan maupun mencari solusi bagi warga yang pekerjaannya tergantung pada WPS di kafe.

Berikut ini beberapa kutipan yang disampaikan oleh narasumber FGD dari perwakilan kelompok masyarakat.

"....kalau bisa jangan dibongkar pak. Sekarang 'kan sulit sekali untuk mencari kehidupan. Karena kami sebagai tukang ojek penghasilan banyak dari anak-anak yang kerja di kafe-kafe..." (tukang ojek, FGD)

".... yang jelas saya nggak setuju mas. Karena yang beli dari warung saya itu anak-anak lokasi....." (Pedagang, FGD).

"....dari kesehatan masyarakat memang sangat mengkhawatirkan. Takutnya mereka yang berkecimpung di sini bisa menyebarkan penyakit. Tapi itu juga dilema, kalau di tutup warganya juga sulit dapat kerja. Tapi dari sudut pandang agama, memang seharusnya ditutup tapi dari ekonomi warga di sini banyak yang tergantung dari sini..." (Kader kesehatan, FGD)

Informasi penutupan sampai penelitian dilakukan, belum secara jelas diperoleh informasinya oleh warga sekitar Dadap. Informasi yang diperoleh hanya dari mulut ke mulut dan diakui oleh narasumber dari kelompok masyarakat nelayan, pernah dilakukan kegiatan pendataan, tapi untuk sosialisasi belum pernah dilakukan.

"...Belakangan ini santer sekali mas. Tahun lalu juga pernah dengar kabar lokasi ini mau ditutup. Kemudian beberapa tahu yang lalu lokasi ini pernah ditutup tapi nggak dirawat. Dibiarin begitu aja. Jadi setelah digusur timbul lagi. Warga di sini agak sulit untuk menerimanya...."

"...kami nggak setuju pak. Karena warga disini sangat tergantung dari lokasi ini..." (ibu rumah tangga, FGD)

"...Dampak penutupan buat kami ,.....yang jelas rumah kami (nelayan) juga pasti kena gusur juga pak. Kan nggak mungkin milih-milih. Terus kalau sudah di gusur kami mau pindah kemana lagi...?"

"...di sini pak yang ngontrak rumah kami itu 70% nya anak-anak lokasi. 30% nya warga biasa...(yang juga kerja di kafe)...dan juga tergantung pemerintah kalau mau dikasih ganti rugi yang sesuai..."

"...Saya sih nggak setuju. Karena kami mau dipindahkan kemana lagi?.." (Nelayan, FGD)

"...semua kerjanya tergantung dari lokalisasi ini pak,...Tukang ojek sudah jelas, pedangang, tukang nyuci, tukang air yang sudah lama jadi langganan di kafe..."

"...Dampak positifnya anak-anak remaja yang ada di lingkungan kami bisa terjaga dari hal-hal ini. Mereka juga tidak minum alkohol. ..."

"...Negatifnya ekonominya berkurang. Masyarakat jadi susah mencari kerja. ..."

Secara pribadi saya lebih memilih keluarga pak. Jadi buat saya lebih penting anak dan cucu saya nanti. ..." (Tukang ojek, FGD)

"...ya lebih penting adalah menyelamatkan generasi muda dari penyakit HIV AIDS. Anak-anak juga takut kena HIV..." (Kader kesehatan, FGD)

3.5.4 Perspektif pelaksana dan pengelola Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS

Rencana penertiban lokasi Dadap berdasarkan pengetahuan dari perspektif LSM juga masih berita yang tersebar dari mulut ke mulut. Menurut pengetahuan mereka, berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan sudah ada petugas yang melakukan pengukuran jalan. Perspektif LSM dari sudut pandang program HIV menyatakan, kurang tepat jika lokasi ditutup dengan beberapa pertimbangan bahwa program penanggulangan HIV di sana tidak efektif. Program menjadi sulit karena pekerjaannya terpencar-pencar dan sulit untuk dideteksi keberadaan mereka. WPS akan menutup dirinya ketika mereka pindah ke tempat lain dan pada saat yang sama HIV itu terus menyebar ke pelanggan-pelanggan mereka.

"...dari sisi program memang tidak setuju. Karena program HIV jadi sulit. Yang ngumpul aja susah apalagi yang menyebar. Karena tidak tahu berhubungan dengan siapa..." (BMG, FGD)

“...terkait pemberdayaan WPS itu ada usahanya tetapi mereka akan balik lagi. Ketika balik ke sana pendapatannya jauh lebih banyak. Ketika di gusur yang ditakutin adalah odha-odhanya mencar...” (aktivis LSM, FGD)

“....Saya melihatnya terkait pembeli dan penjual. Sepanjang ada pembeli ada penjual. Kalau tidak ada lagi pembeli, target itu akan tercapainya sendirinya. Jadi masyarakat harus ada kesadaran terhadap resiko itu sendiri..... Sebenarnya mereka tahu, tapi karena kebutuhan itu sendiri masih ada...” (Aktivis LSM, FGD)

“.... tidak setuju., karena ada WPS yang sudah positif, tidak tahu harus kemana. Mereka masih butuh pendampingan....” (Aktivis LSM, FGD)

Antisipasi yang perlu diperhatikan dengan adanya wacana penertiban lokasi diperlukannya sosialisasi yang menyeluruh, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha kafe, memperhatikan ekonomi warga lokal, termasuk rumah-rumah nelayan yang akan kena dampak. Harus ada pemberdayaan bagi masyarakat terutama nelayan.

“....Ditutup silahkan. Kumpulkan tokoh agamanya, LSMnya, masyarakatnya. Kita ngomong di forum. Rencananya begini-begini, kamu maunya gimana, Kebutuhannya begini-begini....” (Aktivis LSM, FGD)

“....Untuk WPS nya mereka pasti akan pulang kampung. tapi yang berdampak kan masyarakat lokalnya. Di khawatirkan nanti angka kriminalitasnya meningkat karena banyak yang nganggur. Jadi Pemerintah harus memberikan jalan keluar buat mereka. Jadi harus bisa menampung bagi pekerja lokal. Jadi apa yang dibangun bisa menyerap tenaga kerja....” (Aktivis LSM, FGD)

“....Dari sisi pendampingan ODHA harus diberikan informasi yang jelas, mereka harus tahu di mana tempat akses. Bagaimana mengkses layanan untuk ODHA..” (Aktivis LSM, FGD)

“....Kalau duit dapat pasti langsung habis. Kalau pariwisatanya sehat cari yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak...” (Aktivis LSM, FGD)

3.6 Rencana dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Wacana Penertiban Lokasi Dadap Ceng'in

Wilayah Dadap Ceng'in yang berada di kecamatan Kosambi, kabupaten Tangerang. Merupakan wilayah pesisir yang terletak di utara yang berhadapan langsung dengan laut Jawa dan merupakan pintu gerbang masuk Kabupaten Tangerang dari DKI Jakarta, dan merupakan kawasan area milik PT. Angkasa Pura II yang merupakan operator dari Bandara Internasional Soekarno–Hatta. Sudah tentu wilayah tersebut telah menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten Tangerang selaku otoritas daerah dan PT Angkasa Pura II selaku pemilik lahan wilayah Dadap Ceng'in.

Menempati kawasan pesisir dan berdampingan dengan daerah aliran sungai (DAS), masyarakat yang ada di Dadap Ceng'in harus menghadapi banjir rob (laut pasang) pada tiap bulan. Dapat dibayangkan wilayah yang padat dan kumuh di genangi air setinggi lutut orang dewasa, tentu banjir rob mengganggu aktifitas masyarakat yang bermukim di wilayah ini. Adanya kawasan hiburan malam yang terletak di sepanjang jalan utama wilayah Dadap Ceng'in menambah pelik permasalahan sosial masyarakat. Hiburan malam yang menyajikan karaoke dan wanita peneman tamu minum merupakan gambaran yang dapat dilihat pada setiap malam di wilayah ini.

Menyikapi situasi yang terjadi di Dadap Ceng'in, pemerintah daerah dan PT. Angkasa Pura II sebagai pemilik lahan memiliki rencana untuk merubah kawasan Dadap Ceng'in menjadi kawasan wisata kelautan dan kuliner. Area yang dianggap memiliki permasalahan sosial dan lingkungan kumuh akan diubah menjadi area modern yang mengedepankan aspek kawasan ekonomi terpadu.

Perencanaan perubahan kawasan Dadap Ceng'in pada tahun 2015 akan dapat meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Merubah sendi ekonomi masyarakat yang ketergantungan dengan pola prostitusi dengan pola wisata kelautan dan kuliner. Rencana ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengembangkan kawasan pesisir dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Strategi ini diyakini menjadi sebuah solusi dalam merubah dan menata ulang kawasan tersebut. Tetapi apakah masyarakat lokal yang ada di Dadap Ceng'in akan mampu mendapatkan keuntungan secara langsung dari perubahan kawasan tersebut. Untuk itulah perlu dibuat kajian khusus untuk mengetahuinya.

Poin-poin berikut di bawah ini adalah sejumlah pendapat yang muncul dari diskusi pada kelompok staff pemerintah:

- Perekonomian dengan mengamankan aktifitas ekonomi yang terjadi di dadap, dengan memaksimalkan aspirasi dari masyarakat (*bottom up*).
- Pendidikan: keberadaan lokasi Dadap mempengaruhi sikap dan mental anak, dan tingkat pendidikan di wilayah tersebut, seharusnya ada fokus pada perlindungan anak.
- Sosial: Adanya lokasi cenderung akan menjadi tempat tumbuhnya kriminal, urbanisasi, 100% bukan warga asli, tingkat stressor tinggi.
- Lahan: Ada peruntukan sesuai kepemilikan dan status lahan dan pemanfaatannya diwilayah tersebut. Izin usaha (kontrakan, karaoke)
- Pengendalian penyakit: perlu untuk membuat jejaring dari seluruh instansi (Polisi, Satpol PP dll) guna meminimalisir penyebaran ekspansi mantan WPS yang lebih luas, serta laki-laki resiko tinggi cenderung dari masyarakat lokal, melakukan pemetaan kemungkinan WPS

tersebut akan pindah selama masih ada di wilayah Tangerang, Dinkes akan terus melakukan pemantauan guna pencegahan penularan IMS dan HIV AIDS (konsep *Supply and demand*) terutama pada konteks pelanggan.

- Ekonomi: Melakukan sosialisasi khusus untuk masyarakat di wilayah sekitar, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, sosialisasi konsep tata ruang.
- Pemanfaatan lokasi: Hutan kota, taman kota, TPI, kuliner, penghijauan, wisata kuliner.
- Adanya gerakan bersama dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, perlunya ada ketegasan serta penegakan hukum tanpa melihat dan memilih siapa saja “Anggota Dewan”.
- Komitmen pemerintah: seluruh masyarakat harus terlibat langsung

3.7. Rekomendasi praktis

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat dirangkum bahwasanya, ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pembubaran lokasi Dadap Ceng'in. Masyarakat yang mempunyai pandangan setuju dengan alasan untuk mengurangi potensi pengaruh negatif terhadap anak-anak di sekitar lokasi, namun masyarakat yang setuju ini juga mengharapkan ada kegiatan/program yang dipersiapkan bagi masyarakat yang secara ekonomi mempunyai ketergantungan dengan keberadaan lokasi Dadap Ceng'in.

Masyarakat yang setuju ataupun kurang setuju dengan rencana penutupan lokasi ini, mengutarakan beberapa saran dan usulan untuk ada kegiatan sosialisasi dan rencana pemerintah daerah dengan pemanfaatan lahan bekas lokasi. Berikut ini beberapa rangkuman dari usulan/rekomendasi yang diutarakan oleh masing-masing kelompok kelas FGD, yaitu:

1. Dari LSM

- Apapun yang dibangun di sana diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Ketika peralihan usaha mereka pun tidak ada masalah. WPSnya pasti akan pulang ke kampung atau beberapa mungkin pindah ke wilayah lain.
- Harus ada pemberdayaan masyarakat.
- Diharapkan Pemerintah mempersiapkan lembaga ekonomi di tingkat bawah semacam koperasi yang terkoordinir dan mempunyai rencana program yang jelas. Koperasi ini juga termasuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan sarana nelayan yang berada di wilayah Dadap.

- Dari kesehatan lingkungan, memang warga harus di relokasi melihat lingkungannya yang sangat kumuh, air laut sering pasang, sampah berserakan di muaranya. Jadi harus dilakukan pengurukan dan perapihan sarana kesehatan dan lingkungan.

2. Dari pengusaha hiburan dan keamanan

- a. Perlu adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah
- b. Pemerintah dalam melakukan rencana ini harus melibatkan warga dalam musyawarah.
- c. Transparansi dalam semua proses kegiatan, jangan ada proses yang terselubung untuk kepentingan pihak swasta (*developer*).
- d. Perlu untuk memikirkan ganti rugi bagi bangunan-bangunan yang permanen.
- e. Relokasi warga asli ke wilayah yang lebih layak.
- f. Perlu ada persiapan/rencana terkait mata pencaharian lain untuk warga yang selama ini hidupnya tergantung pada lokasi hiburan.

3. Rekomendasi dari kelompok masyarakat

- Perlu ada sosialisasi mengenai rencana penertiban sehingga masyarakat akan meresponnya dengan baik.
- Dipersiapkan alternatif kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang akan kehilangan sumber nafkah dengan hilangnya keberadaan lokasi Dadap Ceng'in.
- Adanya tindakan untuk menjaga lingkungan, sehingga potensi konflik yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan musyawarah kekeluargaan.

".... Dibenahi dululah pedagangnyanya, tukang ojek, tukang cuci supaya mereka ngak nganggur. Mereka perlu disalurkan supaya dapat kerja lagi..." (Tukang Ojek)

"....Minta diperhatikan usaha nelayan, jangan diabaikan begitu saja.... misalnya bantuan untuk usaha tangkapan. .." (nelayan)

"....Sosialisasikan dulu ke masyarakat, untuk apa ditutup, apakah ada bantuannya, semacam pemberitahuan gitulah..." (Pedagang)

"....Sediakan lahanlah pak kalau ini mau ditutup. Jadi kami juga nggak pusing...." (Nelayan)

"....kalau menurut saya pak, sediakan lahan sebagai ganti rugi rumah yang digusur, kemudian anak-anak muda disalurkan ke pelatihan kerja (balai latihan kerja), warga juga disalurkan ke pabrik-pabrik supaya nggak nggak nganggur." (Tukang Ojek)

BAB IV

KESIMPULAN, DISKUSI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian bab terakhir ini akan dipaparkan sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan-temuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada tujuan utama penelitian. Pada tiap-tiap topik yang disusun berdasarkan tujuan utama penelitian, akan dijelaskan kesimpulan serta rekomendasi yang muncul dari diskusi dengan berbagai narasumber/informan, dan yang *insight*/pemahaman yang muncul dari diskusi internal tim peninjauan cepat.

4.1 Rencana dan Strategi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Dari seluruh proses wawancara dan yang dilaksanakan dengan berbagai narasumber ataupun diskusi kelompok terarah, disimpulkan bahwa sampai saat ini rencana mengenai penutupan/penerbitan lokasi Dadap Ceng'in bukanlah sebuah rencana yang sudah pasti ataupun pernah dituangkan dalam bentuk rencana tertulis. Karena itu rencana tersebut lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah wacana yang baru dilontarkan dalam bentuk pemikiran yang pernah disampaikan secara verbal oleh pejabat pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun, meskipun masih berupa wacana beberapa pihak telah memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana gambaran dari pengembangan kawasan Ekonomi wilayah Utara Kabupaten Tangerang yang memiliki implikasi pada penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in.

Terkait dengan penyusunan rencana dan strategi ini, pihak pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memperjelas dan membuat gambaran detail tertulis mengenai visi Pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kawasan pantai Utara, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh pihak BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangun Daerah) Kabupaten Tangerang. Pengembangan visi ataupun rencana perlu melibatkan sektor-sektor terkait sehingga dapat diikuti dengan pengembangan penyusunan tahapan dan rencana kerja yang lebih rinci terhadap rencana yang disepakati dan dipahami bersama oleh seluruh sektor terkait. Keberadaan rencana yang jelas mengenai aspirasi Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi penting sebagai acuan bersama baik pada kalangan pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait (masing-masing SKPD), dan bagi masyarakat di lokasi Dadap Ceng'in yang akan menjadi obyek utama dan terdampak sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tersebut.

Lebih jauh, kejelasan tentang rencana ke depan sebagai bagian rencana penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in disebut oleh sebagian *stakeholder* lokal (masyarakat yang akan terdampak langsung) sebagai bagian yang penting mengenai bagaimana masyarakat akan menyikapi penutupan/penertiban lokasi. Masyarakat menyatakan akan tunduk dan patuh pada

rencana Pemerintah selagi hal tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat disertai dengan ganti rugi atau kompensasi yang adil. Namun jika ternyata penertiban/penutupan lokasi didasarkan pada kepentingan atau akan diambil alih pada pihak swasta, maka masyarakat akan menuntut untuk disertakan secara langsung dalam negosiasi ganti rugi yang akan dilakukan dengan pihak swasta terkait.

Pandangan dari beberapa narasumber dari institusi Pemerintah menyebutkan kejelasan rencana menjadi prasyarat penting dalam proses sosialisasi awal kepada masyarakat untuk menghilangkan ketidakpastian dan menjadi dasar terhadap langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil.

4.2 Persepsi Masyarakat dan *Stakeholder* Lokal Tentang Wacana Penertiban.

Pandangan dan pendapat masyarakat terhadap wacana penutupan/penertiban lokasi tidak begitu beragam. Beberapa pandangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya warga masyarakat sadar dan menerima kenyataan bahwa mereka saat ini tidak tinggal di tanah milik mereka sendiri, atau berstatus tidak sah. Karena itu mereka akan mendukung kebijakan Pemerintah selama dilakukan secara adil. Bentuk keadilan menurut masyarakat adalah apabila penutupan dilakukan dengan dasar kepentingan masyarakat dan dengan alternatif ganti rugi terhadap penghidupan yang telah mereka bangun dan jalani melalui keberadaan lokasi Dadap Ceng'in selama ini.
2. Pandangan sinis dan cenderung tidak percaya dari sebagian warga terhadap wacana penutupan. Meskipun sebagian warga pernah mendengar kabar atau selentingan tentang rencana penertiban lokasi Dadap Ceng'in, seperti yang telah dilakukan pada beberapa lokasi lain di seputar Kelurahan Dadap dan Kosambi Timur, namun seringkali razia dan penertiban yang telah dilakukan namun tidak ada tindak lanjut yang jelas menimbulkan ketidakpercayaan warga pada keseriusan Pemerintah untuk sungguh-sungguh melakukan penertiban. Penertiban tanpa disertai rencana jelas dianggap hanya mengganggu penghidupan masyarakat yang sudah terlanjur berkembang dengan situasi yang ada dan membuang-buang waktu, tenaga dan dana.

4.3 Potensi Pengaruh Penutupan/Penertiban Lokasi Dadap Ceng'in Terhadap Program Pencegahan IMS dan HIV AIDS.

Program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di lokasi Dadap Ceng'in merupakan salah satu bentuk praktik terbaik (*best practice*) dalam intervensi HIV yang telah dikembangkan di berbagai lokasi-lokasi yang masih ada di banyak tempat di seluruh penjuru Indonesia. Capaian dan hasil kerja yang baik dari kegiatan pencegahan HIV AIDS dan IMS dari lokasi Dadap Ceng'in dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan yang dapat menjadi contoh kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan di sebuah lokasi yang melibatkan KPA, Dinkes- Puskesmas, LSM, tokoh masyarakat, keamanan, dan pihak lainnya.

Khusus untuk wilayah kerja pencegahan penanggulangan HIV AIDS dan pengendalian IMS di wilayah Kabupaten Tangerang, lokasi Dadap Ceng'in adalah penyumbang utama dalam berbagai capaian program (PMTS, VCT, dan penjangkauan).

Penutupan tanpa langkah antisipasi yang terencana akan menimbulkan berbagai masalah baru terkait dengan upaya kerja keras yang sudah dilakukan selama ini. Kesulitan membangun sistem yang baru, kehilangan kontak yang telah terjalin dan dibangun selama ini, serta tantangan besar akan muncul dalam memonitor perkembangan IMS dan HIV khususnya pada kelompok WPS.

Selain itu resiko lain yang dipastikan akan muncul adalah potensi meluasnya masalah sosial dengan berpindahnya lokasi dan berbaur ke masyarakat. Menyebarnya kelompok WPS ke wilayah lain di luar Dadap Ceng'in, diyakini akan diikuti dengan kecenderungan baru, yaitu kerentanan terjadinya penyebaran IMS dan HIV di kalangan masyarakat umum yang lebih tidak terkontrol. Selain itu, merujuk pada berbagai pengalaman yang telah terjadi dalam kasus-kasus penutupan lokasi WPS yang telah banyak dilakukan di banyak wilayah lain di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, kemungkinan lain yang akan terjadi adalah kelompok WPS akan kembali dan menempel pada bagian tertentu dari kawasan baru yang dikembangkan.

Beberapa rekomendasi yang muncul dari proses peninjauan cepat khususnya dari kelompok pihak-pihak yang telah terlibat aktif dalam kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV AIDS di lokasi Dadap Ceng'in antara lain:

- Membuat pemetaan ulang titik hotspot untuk memantau kemungkinan adanya penambahan anggota baru pada wilayah-wilayah WPS yang telah teridentifikasi; memetakan ulang sumber daya (tempat layanan, pelatihan masyarakat, kegiatan advokasi pada masyarakat sekitar), dan mendesain ulang model intervensi yang memungkinkan untuk dikembangkan atau dilaksanakan sebagai pengganti bentuk intervensi telah dikembangkan selama di lokasi Dadap Ceng'in.

- Pemerintah diharapkan akan dapat menggunakan pengalaman dan pemahaman dan Program IMS dan HIV AIDS dari kerja yang sudah dilaksanakan selama ini di lokasi Dadap Ceng'in, untuk penanganan masalah pelacuran lainnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

4.4 Rekomendasi *stakeholder* terkait proses penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in.

Berikut adalah kesimpulan dari rekomendasi utama sebagai bagian persiapan dari *stakeholder* pemerintah dan masyarakat mengenai penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in yang meliputi:

- a. Sosialisasi.** Proses sosialisasi adalah bagian yang sangat penting sebagai bagian dari rencana penutupan/penertiban untuk mengurangi dampak-dampak negatif akibat situasi tidak pasti yang dapat berkembang di masyarakat. Proses sosialisasi harus dapat menjelaskan alasan tindakan pemerintah, dan rencana bagaimana penggunaan lokasi yang selama ini sudah digunakan warga. Proses sosialisasi seharusnya menjadi proses dialogis dan mencakup sampai pada seluruh warga yang mungkin akan terdampak dan tidak hanya pada perwakilan atau kelompok-kelompok tertentu.
- b. Pendataan.** Sampai saat ini, tidak ada data yang cukup jelas sebagai batas wilayah yang disebut sebagai lokasi Dadap Ceng'in. Kejelasan status kependudukan, data warga yang menetap ataupun berstatus sementara, dan berbagai jenis usaha permanen ataupun tidak permanen yang sedang berjalan menjadi bagian penting sebagai data awal untuk langkah-langkah penertiban/penutupan lokasi. Proses pendataan diharapkan dapat dilakukan secara partisipatif melibatkan tokoh/pejabat lokal, serta pihak-pihak yang dianggap netral agar hasil pendataan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil pendataan dapat digunakan oleh pihak pemerintah dalam menentukan langkah-langkah konkrit sebagai acuan untuk mengatur agar lokasi tidak berkembang lebih besar walaupun tetap tidak dapat digunakan sebagai justifikasi terhadap apapun bentuk kegiatan yang melanggar hukum.
- c. Kegiatan Persiapan.** Belajar dari beberapa proses penutupan/penertiban lokasi di tempat-tempat lain, salah satu langkah penting yang layak dipertimbangkan adalah pengadaan kegiatan pemberdayaan ekonomi warga terdampak akibat penutupan/penertiban. Penyediaan kegiatan pengembangan atau peningkatan keterampilan usaha, serta kesempatan untuk mengakses layanan berupa konsultasi, modal, dan bimbingan usaha kecil pada warga yang membutuhkan, adalah contoh-contoh layanan yang dapat dikembangkan. Alih ekonomi dalam bentuk upaya untuk memperbesar peluang kesempatan bekerja untuk warga melalui rekomendasi untuk bekerja pada perusahaan disekitar wilayah Dadap dan

Kosambi Timur juga menjadi rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah lokal. Kegiatan pembinaan dan alternatif kesempatan kerja pada WPS, serta pemulangan ke tempat asal dengan difasilitasi pemerintah tetap masuk dalam rekomendasi sebagai bagian persiapan penutupan dan penertiban lokasi.

- d. Optimalisasi layanan berjalan dan pengembangan layanan yang memungkinkan.** Seluruh kegiatan dan layanan yang sudah dikembangkan dan berjalan sampai saat ini diharapkan akan tetap dipertahankan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan sampai proses penutupan/penertiban lokasi selesai dilakukan. Sebaliknya, kegiatan yang sudah berjalan, diharapkan dapat digunakan sebagai bagian pendukung dari pengembangan layanan atau kegiatan untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Misalnya penyediaan kegiatan untuk anak-anak dan remaja yang selama ini tidak tersedia. Pengembangan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
- e. Kajian lanjutan.** Studi peninjauan cepat yang telah dilaksanakan ini hanya memberikan gambaran awal mengenai berbagai opini dan aspirasi dari *stakeholder* pemerintah dan masyarakat terkait dengan wacana penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in. Mempertimbangkan metode yang digunakan, berupa peninjauan cepat, yang ditujukan untuk memotret secara cepat, maka untuk penentuan langkah-langkah dan penyusunan perencanaan yang lebih rinci, dibutuhkan kajian lanjutan yang lebih mendalam. Yang patut dipertimbangkan adalah bahwa studi lanjutan perlu bersifat partisipatoris dan memberikan ruang kepada masyarakat yang berpotensi terdampak dalam rencana penutupan/penertiban lokasi untuk bersuara dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan langsung mereka ke depan.

4.5 Contoh Tahapan Rencana Program Penertiban Lokasi Dadap Ceng'in

Di bawah ini akan dipaparkan ringkasan salah satu bentuk alternatif tahapan program yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dalam rencana penutupan/penertiban Dadap Ceng'in. Pilihan jangka waktu tahapan proses dapat disesuaikan dengan pertimbangan yang akan diambil oleh berbagai pihak. Misalnya pilihan dapat diambil menggunakan pilihan jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Pada prinsipnya, waktu persiapan yang lebih panjang akan memberikan peluang untuk melakukan proses-proses tahapan persiapan dan pelaksanaan secara lebih baik dan memberikan ruang untuk meminimalkan dampak-dampak negatif yang dapat muncul akibat

penutupan lokasi hiburan. Adapun salah satu contoh proses penutupan/penertiban tersebut dapat meliputi:

- a. Pendataan warga. Kegiatan dilakukan melalui proses penelitian partisipatoris dan melibatkan pihak yang dianggap netral untuk mendapatkan data yang paling akurat.
- b. Mengoptimalkan layanan-layanan IMS dan HIV AIDS yang sudah ada dan masih dapat berfungsi. Kegiatan ini meliputi upaya survailans dan memonitoring proses pelaksanaan di tingkat lapangan.
- c. Pelatihan dan penguatan masyarakat terdampak. Kegiatan ini misalnya dalam bentuk pelatihan kerja dan rekomendasi penggunaan tenaga kerja lokal untuk mendapat peluang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di seputar lokasi Dadap Ceng'in.
- d. Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk orang-orang muda. Kegiatan ini dapat dikembangkan bersamaan dengan peluang untuk mengakses dana usaha kecil ataupun kelompok usaha bersama.
- e. Penawaran paket kompensasi bagi warga yang dianggap memang layak untuk mendapatkan kompensasi.
- f. Pembentukan panitia ataupun kelompok yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan penutupan dan penertiban lokasi.

BAB V PENUTUP

Kemunculan lokasi Dadap Ceng'in adalah sebuah perjalanan yang relatif panjang. Sebuah perjalanan yang muncul sebagai bagian proses pembangunan yang dikembangkan sejak jaman pemerintahan Orde Baru, berlanjut hilang dan muncul pada masa Reformasi dan tetap berlanjut sampai menjadi lokasi dengan suasana seperti saat ini.

Warga yang saat ini menetap di lokasi Dadap Ceng'in dapat disebutkan sebagai akumulasi dari masyarakat pendatang dengan berbagai latar belakang yang mencari peruntungan, membangun kehidupan dengan segala konsekwensi yang dihadapi masing-masing. Yang jelas, warga yang pindah ke wilayah Dadap Ceng'in melakukan pilihannya secara sadar. Mereka pindah ke wilayah ini dan menetap, serta membangun kehidupan melalui keberadaan lokasi hiburan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Kehidupan lokasi Dadap Ceng'in mencakup kehidupan 600-700 WPS yang bekerja melalui usaha hiburan dan sejumlah orang yang tergantung dari kehidupan pekerjaan tersebut, selain itu secara nyata lokasi Dadap Ceng'in juga telah menyokong sekitar 700 keluarga yang menetap dan berkehidupan di lokasi dan seputaran lokasi Dadap Ceng'in.

Kepemimpinan dan kebijakan pemerintah akan menjadi faktor yang paling menentukan bagaimana masa depan dari Lokasi Dadap Ceng'in dan proses yang akan dilaluinya dalam perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Proses penutupan sebuah lokasi bukanlah hal yang baru bagi pemerintah. Proses penutupan atau penertiban dapat bersifat seketika, dilakukan dalam waktu singkat, dilakukan dengan durasi waktu jangka menengah, atau melalui persiapan yang matang dan berjangka panjang. Ada banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipelajari dari penutupan dan penertiban berbagai lokasi yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan masaah serupa. Hal ini semua tergantung dari pilihan kepemimpinan daerah dan komitmen berbagai sektor yang menyertainya.

Masyarakat tentu saja berharap akan diperhitungkan dan didengar dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan rencana penutupan lokasi. Kejelasan pemerintah mengenai rencana pengembangan kawasan ekonomi Pantai Utara, ataupun alasan lain untuk penutupan dan penertiban lokasi menjadi hal terpenting dalam wacana ini.

Semoga berbagai informasi dan rekomendasi yang dipaparkan dalam laporan studi peninjauan cepat ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dan bagian dari dokumentasi awal terkait dengan wacana penutupan/penertiban lokasi Dadap Ceng'in.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Jadwal FGD dan Interview

No	Kegiatan	Partisipan	Jadwal
	Fokus Group Diskusi		
1	FGD KPAK		16 Des, Pkl. 9-12
2	FGD Pemerintah lokal		17 Des , pkl 10.00
3	FGD Klp. Pengusaha dan keamanan		18 Des, pkl 13.00
4	FGD Pokja PPH Dadap		18 Des, pkl. 10.00
5	FGD kelompok LSM	Perwakilan Yayasan BMG, Kotex, Edelweis	19 Des, pkl.14.00
6	FGD WPS		17 Des 13.00
7	FGD Masyarakat umum	Perwakilan Nelayan, Tukang Ojek, Pedagang	19 Des. Pkl. 10.00
	Interview		
1	KPAK	Sekretaris KPA	16 Des, pkl 13.00
2	BAPPEDA	Staf Bappeda	16 Des Pkl 14.00
3	Dinkes	Staf Dinkes	16 Des Pkl. 13.00
4	Tokoh Masyarakat	Pak 'Daeng'	17 Des pkl Pkl. 15.00
5	LSM	Staf LSM	18 Des pkl. 16.00
6	Puskesmas	Staf Puskesmas	19 Des 9.00

Lampiran 2. Instrumen pengumpulan data

I. Panduan Pertanyaan FGD

1. Masing-masing bisa jelaskan, Sudah Bagaimana saudara sampai tinggal di Dadap? Apa pekerjaan, atau kegiatan utama di Dadap?
2. Kegiatan ekonomi seperti apa yang anda ketahui di Dadap?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap rencana penutupan Dadap?
4. Apa rencana penutupan yang pernah anda dengar, dari siapa? Apa yang anda setuju/ tidak setuju dari rencana tersebut?
5. Siapa yang akan terkena dampak langsung dan tak langsung penutupan Dadap?
6. Dampak sosial seperti apa yang mungkin muncul akibat penutupan lokasi Dadap?
7. Apa yang perlu diperhatikan/dipersiapkan/diantisipasi pemerintah terkait penutupan?
8. Bagaimana rencana anda selanjutnya bila Dadap telah tutup?

II. Daftar pertanyaan interview

1. Bagaimana sejarah Lokasi Dadap?
2. Apa pengaruh, positif dan negatif dari keberadaan lokasi Dadap?
3. Bagaimana program HIV AIDS yang berjalan di Dadap? Apa saja kegiatan yang berjalan? Bagaimana respon masyarakat?
4. Bagaimana posisi pentingnya program HIV AIDS di lokasi Dadap?
5. Bagaimana rencana penutupan Dadap menurut rencana dan strategi pemerintah? Siapa yang menjadi *leading sector*?
6. Bagaimana dampak penutupan lokasi anda mungkin muncul?
7. Bagaimana langkah persiapan yang penting untuk mengantisipasi dampak penutupan?
8. Apa yang akan menjadi tantangan dalam proses penutupan? Apa yang dibutuhkan pemda untuk mengurangi dampak sosial yang dapat muncul?

Lampiran III. Data sekunder (tema informasi yang diekstraksi)

1. Rencana pemda terkait penutupan Dadap?
2. Data Demografi Dadap (wilayah, jumlah penduduk, pekerjaan).
3. Data warga lokalisasi.
 - a. # WPS yang menetap, masuk keluar, dalam setahun;
 - b. # mucikari, pengelola; # kiwir
 - c. # tukang ojeg

- d. # warung
 - e. # kepala keluarga bekerja di lokalisasi
 - f. kegiatan ekonomi di lokalisasi; losmen, pijat, warung, rumah makan, ojeg, kemaanan, tukang parkir.
 - g. Bisnis di luar terkait ekonomi di lokalisasi dadap.
4. Data program Dinas Sosial, terkait lokasi Dadap (program rutin, non rutin), dan instansi lainnya.
5. Data program AIDS
- a. Kegiatan rutin: bentuk kegiatan, oleh siapa, sumber pendanaan hasil kerja
 - b. Kegiatan insidental yang diadakan?
 - c. Data PMTS: # pengguna layanan, prevalensi/insidens IMS
 - d. Data VCT dan hasilnya

Lampiran 1

Rencana PEMDA terkait penutupan Lokasi

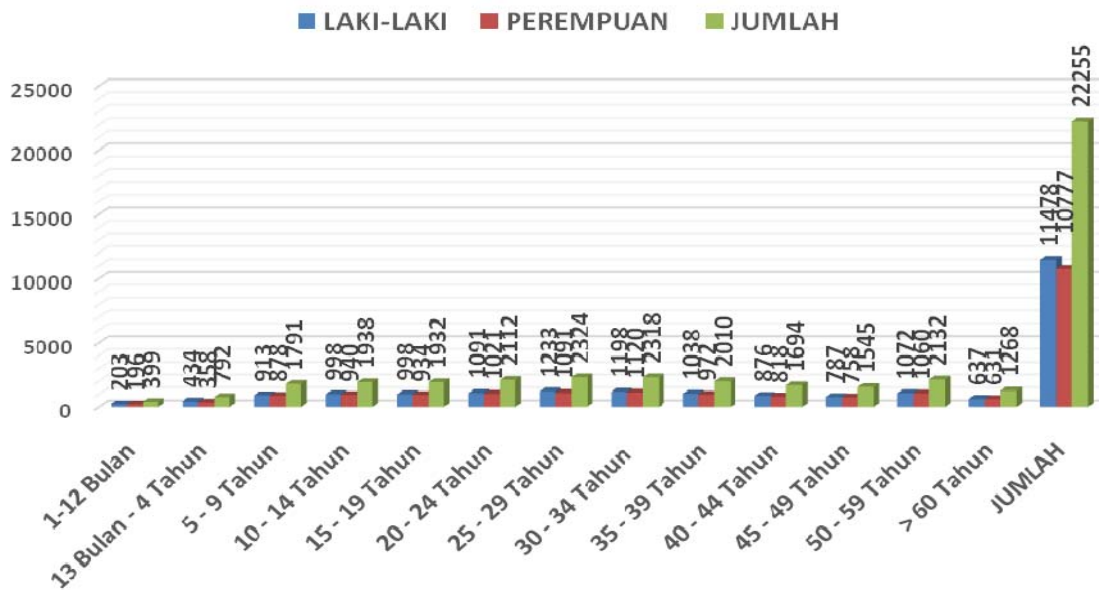
Lampiran 2

Data Demografi Dadap (wilayah, jumlah penduduk, pekerjaan)

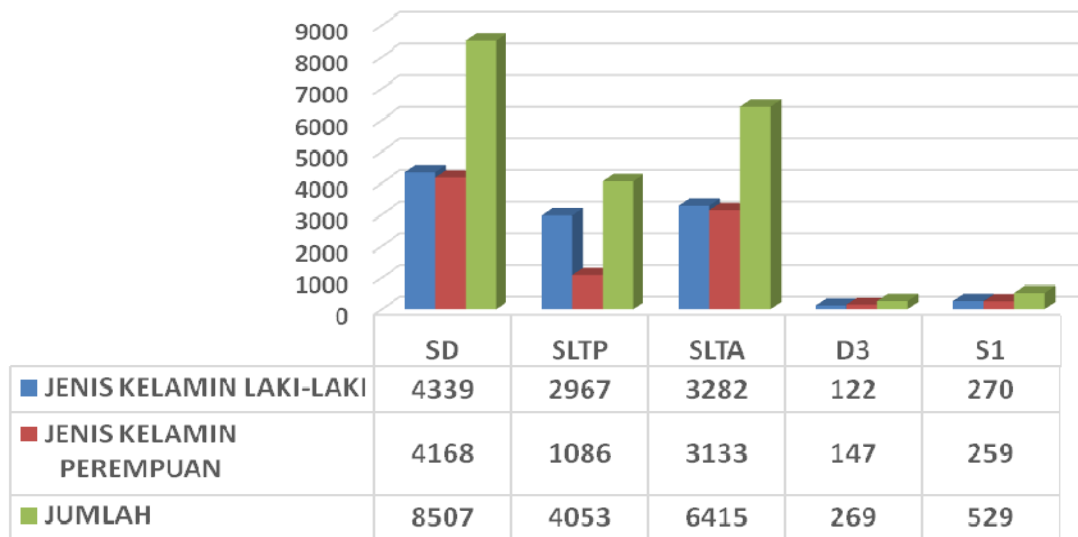
Total KK	Total Penduduk
1491	5265

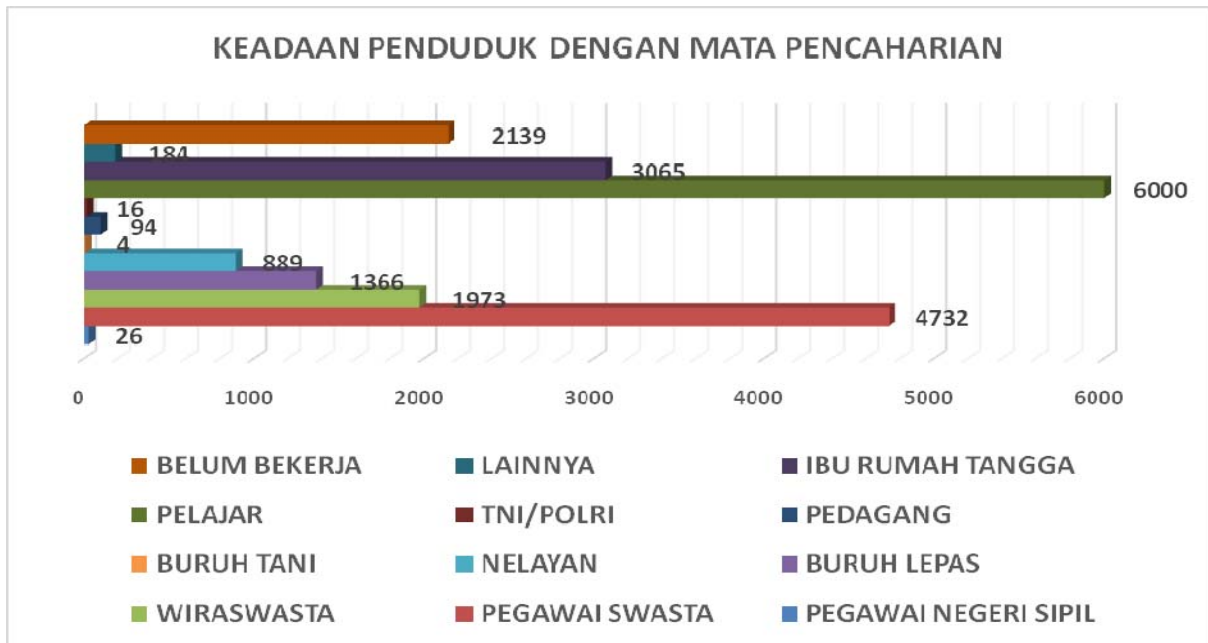
NO URUT RW	NO URUT RT	NAMA	JABATAN	ALAMAT	Jumlah Penduduk			
					L	P	L + P	KK
1		H. Suhandi	Ketua RW 001	Kp. Baru RT.003/001	760	654	1414	403
	1	Sodikin	KETUA RT 001	Dadap RT 001/001	301	249	550	157
	2	Romli	Ketua RT 002	Dadap RT 002/001	233	213	446	125
	3	Edi bin Kiir	Ketua RT 003	Dadap RT 002/0013	226	192	418	121
2		H. J. Usmar	Ketua RW 002	Dadap RT 001/002	882	780	1662	463
	4	Darkum	Ketua RT 001	Dadap RT 001/002	308	277	585	164
	5	Khusen	Ketua RT 002	Dadap RT 002/002	106	101	207	56
	6	Junaidi	Ketua RT 003	Dadap RT 003/002	264	205	469	133
	7	Marliah	Ketua RT 004	Dadap RT 004/002	45	43	88	22
	8	Warnita bi	Ketua RT 005	Dadap RT 005/002	159	154	313	88
3		Nasurun	Ketua RW 003	Dadap RT 001/003	1138	1051	2189	625
	9	Yahya Iraw	Ketua RT 001	Dadap RT 001/003	390	359	749	207
	10	Sana Rais	Ketua RT 002	Dadap RT 002/003	184	186	370	107
	11	Awin Alain	Ketua RT 003	Dadap RT 003/003	362	330	692	196
	12	Miyati/Ma	Ketua RT 004	Dadap RT 004/003	202	176	378	115

KEADAAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR



KEADAAN PENDUDUK MENURUT PENDIDIKANNYA





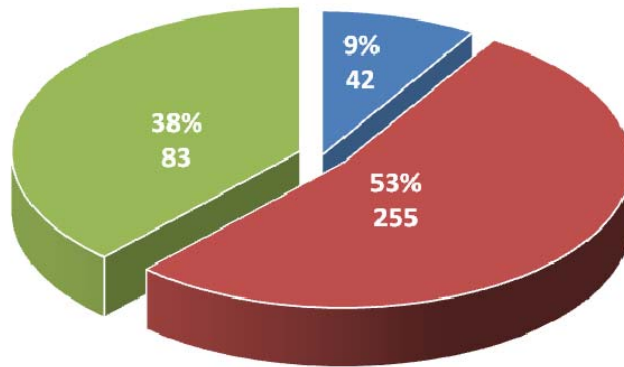
Lampiran 3

Data WPS Pekerja Seks Dadap Ceng'in Kecamatan Kosambi

KELOMPOK USIA	
USIA	JUMLAH
≤ 18 Tahun	42
19 s/d 25 Tahun	255
26 s/d 49 Tahun	183

KELOMPOK USIA

■ ≤ 18 Tahun ■ 19 s/d 25 Tahun ■ 26 s/d 49 Tahun



STATUS PERNIKAHAN

